

## PEMBERITAAN HAJI DALAM SURAT KABAR PEDOMAN TAHUN 1950

Ulum Fasih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Adab Ull Darullughah Wadda'wah

DOI: 10.22437/js.v4i1.33988

e-mail penulis: [ulumfasih@uiidalwa.ac.id](mailto:ulumfasih@uiidalwa.ac.id)

Naskah diterima: 14/06/2024, Naskah direvisi : 15/06/2024, Naskah disetujui : 09/07/2024

### ABSTRACT

*This study will answer a general question about why the news about the Hajj in the Pedoman newspaper in 1950 was published for almost a full year, and what the content of the news contained in the Pedoman newspaper was. The method of this study is a historical method with four stages, heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results of this study explain that reporting on the Hajj in the Pedoman newspaper during the 1950s aimed to provide information to the public regarding the Hajj, especially important information regarding the Hajj from the government and PPPHI as the Hajj organizer. Reports on the Hajj published in the Pedoman newspaper during the 1950s contained information about the preparation, departure and return of Hajj pilgrims from Mecca.*

**Keywords:** news, newspaper, organizing the hajj.

### ABSTRAK

Kajian ini akan menjawab sebuah pertanyaan umum tentang mengapa pemberitaan tentang haji dalam surat kabar Pedoman tahun 1950 dimuat selama hampir satu tahun penuh, dan bagaimana isi berita-berita yang dimuat dalam surat kabar Pedoman tersebut. Kajian ini menggunakan metode sejarah yang dilakukan dalam empat tahap, heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi. Hasil dari kajian ini menjelaskan bahwa pemberitaan haji dalam surat kabar Pedoman selama tahun 1950 bertujuan memberikan informasi kepada masyarat seputar haji, khususnya informasi penting terkait haji dari pemerintah dan PPPHI sebagai penyelenggara haji. Pemberitaan haji yang dimuat dalam surat kabar Pedoman selama tahun 1950 berisi tentang persiapan, pemberangkatan, dan pemulangan jamaah haji dari Mekah

**Kata kunci:** berita, surat kabar, penyelenggaraan haji.

## PENDAHULUAN

Minat dan keinginan masyarakat Islam di Indonesia untuk berhaji pada tahun 1950 cukup besar, harian Pedoman mengabarkan bahwa tercatat sudah ada 420.000 orang Islam di Indonesia yang ingin naik haji.<sup>1</sup> Bahkan diantara mereka banyak yang sengaja menjual atau mengadaikan sawah dan kebun serta perhiasan emas dan intan untuk membayar biaya pergi haji tahun itu.<sup>2</sup> Besarnya minat berhaji tersebut disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, karena pada tahun-tahun sebelumnya umat Islam di Indonesia cukup sulit untuk dapat berhaji ke Mekah. Hal ini karena banyaknya permasalahan yang terjadi seperti jamaah haji tidak jadi berangkat karena tertipu oleh syekh atau penyelenggara haji, kondisi transportasi yang kurang layak dan memadai, serta permasalahan Kesehatan selama perjalanan dan selama di Mekah. *Kedua*, bahwa musim haji tahun 1950 merupakan musim haji pertama dimana negara Indonesia telah merdeka dan berdaulat secara penuh, sehingga pemerintah mulai mengatur penyelenggaraan haji bagi warganya. Tetapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, belum dapat menjalankan tugas tersebut sepenuhnya. Oleh karenanya, pada tahun itu muncul lembaga-lembaga penyelenggara haji non-pemerintah di beberapa daerah. Bahkan sebagian diantaranya telah muncul sejak tahun 1949, dan telah berhasil menyelenggarakan haji bagi jamaah haji Indonesia.

Karena banyaknya lembaga haji non-pemerintah tersebut, Kementerian Agama akhirnya mengeluarkan keputusan dan memilih salah satu dari lembaga haji yang ada untuk bekerjasama dengannya dalam penyelenggaraan haji. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatur penyelenggaraan haji yang lebih baik di bawah pemerintah. Upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian Agama ialah mengeluarkan berbagai penetapan dan keputusan terkait haji tahun itu.

Berbagai ketetapan, keputusan, dan informasi haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, serta informasi terkait haji lainnya diberitakan oleh banyak media massa tanah air, salah satunya oleh surat kabar harian Pedoman. Pemberitaan haji tersebut merupakan suatu hal penting untuk diketahui oleh masyarakat Islam di Indonesia, khususnya bagi mereka yang berniat haji pada tahun itu. Oleh karenanya surat kabar harian Pedoman melakukan pemberitaan seputar haji sejak awal tahun hingga akhir tahun, meskipun pelaksanaan haji pada tahun itu dilakukan pada pertengahan tahun (bulan Juli). Berita-berita haji yang termuat di surat kabar harian Pedoman selama tahun 1950 menjelaskan tentang persiapan pemberangkatan jamaah haji, pemberangkatan jamaah haji, dan kepulangan jamaah haji dari Mekah.

Kajian sejarah pemberitaan haji Indonesia tahun 1950 khususnya oleh surat kabar Pedoman menjadi penting, karena selama ini kurang mendapat perhatian, baik oleh peneliti sejarah haji, peneliti sejarah surat kabar atau media massa, dan peneliti sejarah surat kabar harian Pedoman. Dalam kajiannya Ibnu Aghniya & Dewi Yuliati menekankan pada kiprah surat kabar Harian Pedoman yang dijadikan sebagai media berpikir dan berekspresi para kaum sosialis di Indonesia menjelang pemilu tahun 1955, khususnya sebagai media kampanye bagi Partai Sosialis Indonesia (PSI)

---

<sup>1</sup> Pedoman, 3 April 1950.

<sup>2</sup> Pedoman, 26 Januari 1950.

menjelang pemilu tahun 1955, hal ini tidak lepas dari Rasihan Anwar, pemimpin redaksi Pedoman, yang juga merupakan seorang pemikir politik yang memiliki kecenderungan terhadap Partai Sosialis Indonesia (PSI).<sup>3</sup> Kajian Dhiana Putri Larasaty & Afiliasi Ilafi membahas tentang berita koran Belanda yang dimuat dalam Java Bode, De Locomotief, Bataviasch Nieuwsblad, Het Nies van Den Dag dan juga De Preanger, yang terbit pada masa kolonial antara tahun 1891-1935, tentang Desa Widuri, salah satu desa di Kabupaten Pemalang. Dalam kajiannya Larasaty & Ilafi mengungkapkan bahwa daerah Widuri memiliki kondisi alam yang indah dan masyarakat yang ramah, sehingga menjadi daya tarik bagi orang-orang Eropa untuk berkunjung baik dengan tujuan rekreasi maupun berkegiatan sosial di Widuri.<sup>4</sup>

Adapun dalam kajiannya, Ulum Fasih membahas tentang sejarah pengelolaan haji Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah tahun 1949-1959. Kajian Fasih tersebut tidak membahas secara khusus terkait pemberitaan surat kabar Pedoman, sekalipun sebagian kecil dari berita yang diterbitkan dalam surat kabar Pedoman digunakan sebagai rujukan dalam kajiannya. Fasih mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun itu pemerintah dan lembaga haji non pemerintah memerankan peran penting dalam terselenggaranya ibadah haji umat Islam Indonesia, hal ini karena adanya pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan haji antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.<sup>5</sup>

Kajian lainnya oleh Ida Nuraini & Narayana Mahendra tentang kebijakan redaksi dari beberapa media masa di Indonesia dalam pemberitaan haji tahun 2020 seperti Republika, Kompas, Liputan6, Solopos, dan Kedaulata Rakyat.<sup>6</sup> Kajian Nuraini & Mahendra ini menjelaskan bahwa pada tahun 2020 sedang terjadi pandemi covid-19 di seluruh dunia, sehingga negara-negara Islam termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dalam memberangkatkan jamaah hajinya. Situasi tersebut membuat masyarakat memerlukan informasi haji yang valid, oleh karenanya kebijakan redaksional media massa memerankan peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kebijakan redaksional media massa dalam memberitakan haji tersebut cukup beragam dan berbeda sebelum dan setelah keluar keputusan pembatalan haji oleh Kementerian Agama. Sebelum diputuskan pembatalan, pemberitaan haji media massa mengangkat berita tentang kepastian haji, perubahan-perubahan pelaksanaan haji, dan rencana-rencana Kemenag terkait haji tahun itu. Setelah diputuskan pembatalan, pemberitaan haji media massa cenderung untuk mengangkat pemberitaan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan lebih memilih memberitakan dampak pembatalan haji terhadap usaha atau bisnis yang berkaitan dengan haji.

---

<sup>3</sup> Ibnu Aghniya & Dewi Yuliati. *Harian Pedoman: Media Ekspresi Ideologis Partai Sosialis Indonesia Menjelang Pemilu 1995*, dalam *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021.

<sup>4</sup> Dhiana Putri Larasaty & Afiliasi Ilafi. *Berita Koran Belanda Pada Masa Kolonial Tentang Desa Widuri Di Kabupaten Pemalang*, dalam *Siginjai: Journal of History Studies*, Vol. 3 (2), 2023.

<sup>5</sup> Ulum Fasih. *Mencari Berkah Tanah Suci: Pengelolaan Haji Oleh Menerintah dan Lembaga Swasta di Indonesia 1949-1959* (Yogyakarta: Integritas Media, 2022).

<sup>6</sup> Ida Nuraini & Narayana Mahendra. *Kebijakan Redaksi Media di Indonesia dalam Pemberitaan Haji Tahun 2020*, dalam *Islamic Communication Journal*, Vol. 5, No. 2, 2020.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode sejarah. Metode ini dilakukan dalam empat tahapan: heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi.<sup>7</sup> Heuristik atau pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa surat kabar, buku, serta jurnal. Surat kabar yang dikumpulkan ialah harian Pedoman, yang didapat dari Perpustakaan Pusat Jogja (*Jogja Library Center*), sedangkan buku dan jurnal dikumpulkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini, yang didapat dari berbagai perpustakaan. Sumber yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diverifikasi dengan melakukan perbandingan antar sumber yang ada. Sedangkan interpretasi dilakukan dengan menganalisa setiap fakta yang didapat dari sumber yang telah ditelaah. Selanjutnya dilakukan upaya penulisan sehingga menghasilkan tulisan sejarah secara kritis tentang pemberitaan haji dalam surat kabar Pedoman tahun 1950.

## PEMBAHASAN

### Seputar Surat Kabar Pedoman

Surat kabar Pedoman merupakan surat kabar yang terbit setiap hari. Surat kabar ini didirikan pada tahun 1948 oleh R.H.O Djunaedi, Soemanang Soerjominoto, dan Rosihan. Pada awalnya, gagasan pendirian surat kabar ini dicetuskan oleh R.H.O Djunaedi yang ingin mendirikan surat kabar khusus untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang sedang melakukan perjuangan selama masa revolusi. Oleh karena itu, pada tanggal 29 November 1948, hari pertama diterbitkannya surat kabar Pedoman, memuat pemberitaan tentang pergerakan revolusi, dimana pada masa itu revolusi Indonesia sedang menghadapi ancaman dari Gerakan Agresi Militer Belanda dan Pemberontakan PKI di Madiun.<sup>8</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, surat kabar Pedoman benar-benar menjadi media bagi kaum pergerakan dan gencar dalam memuat berita-berita perjuangan bangsa Indonesia selama masa revolusi. Ditambah lagi dalam susunan redaksi surat kabar Pedoman, dimana Rosihan sebagai ketua dewan redaksi, Sodatmoko dan Sanjoto sebagai dewan redaksi, dan Abu Bakar Loebis sebagai direksi, semakin menguatkan posisi surat kabar Pedoman sebagai surat kabar pergerakan, yang mengusung semangat persamaan dan kesetaraan hak, sesuai dengan ide besar dari kaum pergerakan pada masa revolusi.

Pada tahun 1950 surat kabar Pedoman menginjak usia 3 tahun, berbagai pemberitaan dilakukan agar semakin menarik minat masyarakat terhadap surat kabar Pedoman. Tahun itu merupakan tahun spesial, karna bertepatan dengan adanya penyelenggaraan haji oleh pemerintah untuk pertama kalinya, sehingga pemberitaan terkait haji gencar dilakukan oleh surat kabar Pedoman, meskipun informasi haji yang dimuat dalam pemberitaan tersebut lebih banyak bersumber dari Kantor Berita Antara.

---

<sup>7</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 2005), hal. 90.

<sup>8</sup> Ibnu Aghniya & Dewi Yuliaty. Harian Pedoman: Media Ekspresi Ideologis Partai Sosialis Indonesia Menjelang Pemilu 1995, dalam *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021, hlm. 130-131

Eksistensi surat kabar Pedoman semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya, bahkan pada tahun 1961 surat kabar Pedoman menjadi korang beroplah terbesar dengan tiras sebanyak 53.000 eksemplar, dan mendapat banyak pemasokan dari meningkatnya iklan. Tetapi kebesaran surat kabar Pedoman akhirnya terhenti pada tahun 1974 karena adanya pembredelan dari pemerintah.<sup>9</sup>

### **Pemberitaan Haji dalam Surat Kabar Pedoman Tahun 1950**

#### **A. Penetapan Panitia Haji**

Pada tahun 1950 keberadaan lembaga yang bergerak dalam penyelenggaraan haji sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini karena umumnya calon jamaah haji Indonesia merupakan orang awam, diantara mereka banyak yang tidak mengetahui cara berangkat haji, sehingga apabila berangkat sendiri mereka rentan terhadap penipuan, yang memang pada tahun-tahun sebelumnya sering terjadi. Disamping itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama juga belum mampu sepenuhnya menangani penyelenggaraan haji di Indonesia. Selama masa revolusi kemerdekaan pemerintah lebih banyak menagani permasalahan kenegaraan dari pada masalah sosial keagamaan. Ditambah pula, kondisi negara pada waktu itu, baru mencapai kedaulatan, sehingga Kementerian Agama masih mencari format baru dalam lapangan penyelenggaraan haji Indonesia, yang berbeda dari era kolonial, hal ini sesuai dengan tugas dari Kementerian Agama yang salah satunya ialah melaksanakan pemutaran corak politik keagamaan dari dasar kolonial kepada dasar nasional.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pilihan yang tepat bagi calon jamaah haji pada tahun itu ialah ikut lembaga haji non-pemerintah yang ada.

Surat kabar Pedoman pada tanggal 20 Januari 1950 menjelaskan bahwa terdapat lembaga haji non-pemerintah bernama Panitia Haji (PH), yang dikelola oleh Pusat Kepentingan Umat Islam di Jakarta. Para tokoh yang menjadi pengurus lembaga ini ialah Prawiradinata, Muchtadi, Abd. Manaf, Haji Muchtar, Hilman Djajadiningrat, Mr. Sastromuljono, dan Patih Djajakusuma. Lembaga haji ini sebenarnya telah ada sejak tahun 1949 dan telah memberangkatkan jamaah haji tahun itu.

Pada tahun 1950 kondisi keuangan PH cukup stabil, karena mendapat pemasukan dana sebesar f. 1.300, hasil dari penjualan bendera merah-putih, ditambah pula dengan dana hasil penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Dana tersebut cukup besar dan memiliki *multiplier effects* yang cukup banyak, satu sisi dapat dijadikan sebagai dana cadangan lembaga, satu sisi lainnya sangat potensial untuk dimanfaatkan guna membangun infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan lembaga dan juga kelancaran penyelenggaraan haji tahun berikutnya.<sup>11</sup> Karenanya, maka pada tahun itu PH akhirnya membangun asrama haji di Polonia, dengan tujuan agar jamaah haji tidak terlantar di pelabuhan selama menunggu kedatangan kapal haji. Asrama haji tersebut cukup besar, lengkap dengan peralatan

---

<sup>9</sup> <https://historia.id/kultur/articles/rosihan-anwar-jatuh-bangun-koran-kiblik-vX4dv/page/4> diakses tanggal 11 Juli 2024.

<sup>10</sup> Pedoman, 23 Februari 1950.

<sup>11</sup> Isabella & Firdaus Komar. Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 78.

dapur, 278 ember, dan 362 piring, sehingga dapat menampung 1.371 calon jamaah haji dan 600 orang pengantarnya.<sup>12</sup>

Dengan adanya asrama tersebut, PH semakin berkembang, dan lebih siap dalam melakukan penyelenggaraan haji tahun 1950. Berbagai persiapan untuk mensukseskan hal tersebut dilakukan, bahkan dimulai sejak awal tahun, dengan membuka pendaftaran jamaah haji pada 1 Maret 1950 di Balai Agung di masing-masing daerah. Disamping itu, untuk kelancaran pemberangkatan jamaah haji, PH juga menyiapkan 5 orang pengurus untuk ikut serta dalam rombongan jamaah haji, sehingga keamanan dan kenyamanan jamaah haji selama di kapal dan di tanah suci terjamin dengan baik.

Keberadaan PH cukup menarik minat masyarakat Islam Indonesia, pada 21 Januari 1950 surat kabar harian Pedoman mengabarkan bahwa tercatat sudah ada 263 calon jamaah haji dari Bondowoso yang berniat haji melalui PH.<sup>13</sup> Lebih lanjut harian Pedoman juga mengabarkan pada 26 Januari 1950 bahwa sudah ada 400 calon jamaah haji asal Kandangan yang tercatat berminat haji menggunakan PH.<sup>14</sup> Bisa jadi jumlah umat Islam yang berminat haji melalui PH terus bertambah hingga dibuka secara resmi pendaftarannya pada 1 Maret 1950, sebab pada 2 Maret 1950 harian Pedoman menerangkan tentang adanya maklumat Panitia Hadji Indonesia Pusat di Jakarta tentang ongkos naik haji tahun itu yang belum dapat dipastikan. Ada kemungkinan banyak calon jamaah haji yang telah resmi mendaftar belum memperoleh informasi yang jelas terkait besarnya ongkos haji yang harus mereka bayar.

Disamping keberadaan PH tersebut, harian Pedoman juga mengabarkan adanya dua lembaga non-pemerintah lainnya. *Pertama*, bernama Panitia Angkatan Djemaah Hadji (PADH). Lembaga ini berkedudukan di Magelang, Jawa Tengah, dan diketuai oleh KH. Muchtar bersama S. Sagaf sebagai wakilnya. Untuk dapat melayani seluruh umat Islam di Jawa Tengah yang ingin berhaji, maka di masing-masing kabupaten ditempatkan perwakilannya, seperti di Kebumen, diwakili oleh K. Afandi, Purworejo oleh Ridwan, Temanggung oleh A. Mukmin, dan Wonosobo oleh Moh. Ali. Oleh karena itu, kemungkinan jumlah calon jamaah haji yang mendaftar melalui PADH cukup banyak, sebab minat berhaji umat Islam di daerah ini cukup banyak sama seperti minat berhaji umat Islam di daerah Jawa lainnya, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sayangnya informasi tentang hal itu tidak dapat ditemukan secara pasti.

*Kedua*, bernama Panitia Penolong Djemaah Hadji (PPDH). Lembaga ini berdiri di Jakarta bulan Maret 1950, yang diketuai oleh Mudjibata Zein. Sekalipun PPDH merupakan lembaga haji non-pemerintah baru dan belum memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan haji, serta berdiri di tengah-tengah lembaga haji non-pemerintah lainnya, yang lebih dahulu ada, semisal PH dan PADH, nyatanya cukup banyak umat Islam yang tertarik berhaji dengan menggunakan PPDH, tercatat ada 100 orang yang

---

<sup>12</sup> Pedoman, 20 Januari 1950.

<sup>13</sup> Pedoman, 21 Januari 1950.

<sup>14</sup> Pedoman, 26 Januari 1950.

sudah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji PPDH.<sup>15</sup> Jumlah calon jamaah yang mendaftar terus mengalami kenaikan, harian Pedoman pada 29 Agustus 1950 memberitakan bahwa hingga akhir bulan Agustus 1950 tercatat sudah ada 17.000 calon jamaah haji yang mendaftarkan diri ke PPDH. Banyaknya umat Islam yang memilih PPDH tersebut karena lembaga ini mencari calon jamaah ke daerah-daerah, dimana dalam pencarian tersebut PPDH memperbolehkan setiap orang yang ingin berhaji untuk mendaftar, bahkan untuk perempuan yang sedang hamil sekalipun, serta bagi mereka yang tidak memiliki uang atau biaya haji, karena biaya haji dapat dibayarkan sebagian terlebih dahulu, dengan uang sebesar 100 hingga 400 rupiah, kekurangannya dapat dibayarkan ketika sudah kembali dari Mekah.<sup>16</sup> Bagi mereka, khususnya orang Jawa Barat berhaji dapat meningkatkan status kesalehan dan sekaligus meningkatkan status sosial dalam masyarakat menjadi terhormat.<sup>17</sup> Oleh karenanya keberadaan PPDH menjadi angin segar bagi mereka yang ingin berhaji sedangkan belum memiliki biaya, karena biaya hajinya dapat dibayar sebagian.

Adanya lembaga-lembaga haji yang berdiri di awal-awal tahun 1950 tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan lembaga mana yang sah dan dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan haji di Indonesia, tujuannya ialah agar jamaah haji dapat terorganisir dengan baik oleh pemerintah dan menghindari adanya calon jamaah haji yang tertipu atau batal berangkat karena tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Harian Pedoman memberitakan bahwa lembaga haji tersebut ialah Panitia Perbaikan Perdjalan Hadji Indonesia (PPPHI), yang baru dibentuk pada bulan Maret 1950 di Jakarta.<sup>18</sup> Melalui surat pengumumannya Kementerian Agama menghimbau kepada lembaga-lembaga haji yang ada untuk bergabung dan bekerjasama dengan PPPHI.<sup>19</sup> Setelah pembentukan PPPHI di Jakarta serta telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai satu-satunya panitia haji yang sah dalam penyelenggaraan haji, maka untuk melayani masyarakat secara luas, segera dibentuk PPPHI di daerah-daerah, khususnya di luar Jawa, yang jauh dari jangkauan PPPHI pusat Jakarta, seperti daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bahkan PPPHI juga mendirikan cabangnya di Hijaz, dengan tujuan untuk menerima jamaah haji yang sampai di Mekah dan juga mengurus jamaah haji selama berada disana.<sup>20</sup>

#### B. Persiapan Haji PPPHI

Setelah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang resmi mengatur jamaah haji Indonesia, PPPHI gencar menyiapkan persiapan. Persiapan pertama yang harus dilakukan ialah membuka pendaftaran calon jamaah haji. Harian Pedoman

---

<sup>15</sup> Pedoman, 4 Maret 1950.

<sup>16</sup> Pedoman, 29 Agustus 1950.

<sup>17</sup> Anik Farida, dkk. *Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2020), hlm. 14.

<sup>18</sup> Pedoman, 31 Maret 1950.

<sup>19</sup> Pedoman, 3 April 1950.

<sup>20</sup> Pedoman, 23 Mei 1950.

menyebutkan bahwa ada 420.000 calon jamaah haji yang mendaftar ke PPPHI.<sup>21</sup> Sementara itu, Kementerian Agama dalam surat edarannya menjelaskan hanya mampu memberangkatkan 18.000 calon jamaah haji. Oleh karenanya, Kementerian Agama melakukan seleksi terhadap jamaah haji, sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah baligh dan belum pernah berhaji.
- b. Berpengetahuan agama Islam yang baik, khususnya ilmu tentang haji.
- c. Memiliki bekal yang cukup untuk pergi dan pulang dari Mekah, dan untuk menjamin keluarga yang ditinggalkannya selama menjalankan haji.
- d. Tidak tersangkut dalam urusan polisi, baik kriminal maupun sipil.
- e. Perempuan harus mempunyai muhrim dalam perjalanan, tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Orang yang sudah lanjut usia, harus memiliki kemampuan menjalankan rangkaian ibadah haji.
- h. Dapat membaca huruf arab atau huruf latin, apabila tidak dapat membaca, selekas mungkin untuk belajar membaca huruf latin.

Namun demikian, karena keterbatasan kapal untuk mengangkut jamaah haji Indonesia, Kementerian Agama harus melakukan undian terhadap 18.000 calon jamaah haji yang telah lolos seleksi persyaratan, sehingga hanya 10.000 calon jamaah haji yang benar-benar dapat diberangkatkan tahun itu, dengan rincian untuk Jawa Barat sebesar 2.600 jamaah haji, Jawa Tengah 1.900 jamaah haji, Jawa Timur 2.350 jamaah haji, dan luar Jawa 3.150 jamaah haji.<sup>22</sup>

Persiapan berikutnya ialah melakukan pembagian pas haji di masing-masing daerah. Berdasarkan surat edaran Kementerian Agama, para calon jamaah haji dihimbau bahwa pas haji hanya dapat dipakai untuk perjalanan haji, berangkat dan pulang haji, dan berlaku hanya untuk dua musim haji. pas haji tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Selebihnya, jika ada calon jamaah haji yang menghendaki untuk pergi ke negara lain selain Saudi Arabia, maka harus menggunakan paspor lain, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri.<sup>23</sup> Setelah mendapatkan pas haji, calon jamaah haji kemudian dapat membayar biaya tiket kapal. Harian Pedoman memberitakan bahwa biaya kiket kapal untuk haji ditetapkan oleh Kementerian Agama sebesar f. 3.434.14 untuk kelas terendah dan f. 6.474.14 untuk kelas tertinggi.<sup>24</sup>

Persiapan lainnya, yang juga cukup penting karena menjadi bagian usaha Kementerian Agama untuk mencapai penyelenggaraan haji yang baik ialah menentukan wartawan untuk ikut serta dalam masing-masing rombongan pemberangkatan jamaah haji ke tanah suci. Disamping turut menunaikan ibadah haji, para wartawan tersebut juga memiliki tugas untuk mengabarkan atau meliput

---

<sup>21</sup> Pedoman, 3 April 1950.

<sup>22</sup> Pedoman, 3 Agustus 1950.

<sup>23</sup> Pedoman, 3 April 1950.

<sup>24</sup> Pedoman, 22 Mei 1950.

pemberitaan terkait kondisi dan pengalaman jamaah haji selama perjalanan di atas kapal dan selama menjalankan ibadah haji di Mekah.

Harian Pedoman memberitakan bahwa ada sembilan wartawan yang ditunjuk oleh Kementerian Agama dan PPPHI untuk turut dalam masing-masing kapal, delapan dari Sembilan wartawan tersebut diantaranya Moh. Arifin wartawan kantor berita "Antara" Jakarta, Surono wartawan "Adil" Solo, Bahrum Jamil wartawan "Mimbar Islam" Medan, Asa Bafagih wartawan "Merdeka" Jakarta, Shahab wartawan "A.P.B." Jakarta, A. Basani wartawan "Harian Nasional" Jogja, Timur Jailani wartawan majalah "G.P.I.I" Jogja, dan Abd. Kadir Bahalawan wartawan "Perdamaian" Surabaya.<sup>25</sup>

Kurang begitu jelas atas dasar apa nama-nama delapan wartawan tersebut ditunjuk sebagai wartawan haji, tetapi kemungkinan didasarkan pada reputasi dan senioritas lembaga pers dari masing-masing wartawan tersebut, Terlepas dari itu, penunjukan delapan wartawan tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat dan pers, sebab bagi mereka pemberitaan jamaah haji lebih penting dan utama dibandingkan isu politik atau isu lain yang menyertainya.

Selain wartawan, PPPHI juga mempersiapkan tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia. Tiga dokter diantaranya, dr. Karmawan, dr. Aminudin, dr. Sanusi Ghalib, dan 9 perawat laki-laki dan perempuan.

persatu lembaga haji yang ada bersedia bergabung dengan PPPHI, kecuali PPDH yang masih bersikeras untuk mengatur penyelenggaraan haji bagi calon jamaahnya. Tetapi banyak diantara calon jamaahnya yang kemudian beralih secara pribadi ke PPPHI, khususnya bagi mereka yang belum membayar secara penuh ke PPDH. Harian Pedoman memberitakan bahwa dari total 17.000 calon jamaah haji yang sudah mendaftar ke PPDH itu, tinggal 800 calon jamaah haji yang masih ikut PPDH.<sup>26</sup> Tentu saja tidak semuanya beralih ke PPPHI, ada juga yang tidak jadi berangkat karena suatu hal.

### C. Pemberangkatan Haji PPPHI

Kementerian Agama bersama dengan PPPHI pada tahun 1950 menyiapkan 9 kapal untuk mengangkut jamaah haji Indonesia. Kapal-kapal tersebut merupakan kapal milik perusahaan pelayaran *NV. Nederland*, *NV. Rotterdamsche Loyd*, dan *NV. Ocean*, yang tergabung dalam Kongsi Tiga. Perusahaan pelayaran Kongsi Tiga sendiri telah lama melakukan bisnis pengangkutan jamaah haji di Indonesia, jejaknya dapat ditelusuri setelah dibukanya Terusan Suez tahun 1869, dimana pada waktu itu Kongsi Tiga mulai masuk dalam persiangan bisnis haji bersama dengan Perusahaan pelayaran Inggris untuk mengangkut jamaah haji yang bersal dari Indonesia.<sup>27</sup>

Menurut pemberitaan harian Pedoman, pengangkutan jamaah haji tahun itu dilakukan pada bulan Juli hingga bulan Agustus secara bertahap.<sup>28</sup> Pada tanggal 8 Juli 1950, kapal Tarakan, menjadi kapal pertama yang berangkat ke tanah suci. Dua

<sup>25</sup> Pedoman, 7 Juli 1950.

<sup>26</sup> Pedoman, 29 Agustus 1950.

<sup>27</sup> Martin Van Bruinessen. Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji, dalam *Indonesia dan Haji*, ed. Dick Douwes & Nico Kaptein, terj. Soedarso Soekarno (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 128.

<sup>28</sup> Pedoman, 22 Mei 1950.

hari menjelang pemberangkatan kapal Tarakan, Presiden Sukarno memberikan dukungan dan doa kepada calon jamaah haji yang akan berangkat, khususnya kepada PPPHI agar usaha menyempurnakan perjalanan jamaah haji tercapai dengan baik.<sup>29</sup>

Pada tanggal 20 Juli 1950, kapal Talise, menjadi kapal berikutnya yang berangkat dari pelabuhan Semarang dengan membawa 8 jamaah haji dari Jogja, 50 jamaah haji dari Solo, dan sisanya 27 jamaah haji dari Jawa Tengah lainnya.<sup>30</sup> Kapal lainnya seperti Tabian, Laertes, Tawali, dan Tyndarius berturut-turut berangkat ke tanah suci. Kota Baru, merupakan kapal ketujuh, yang berangkat ke tanah suci tanggal 21 Agustus 1950. Kapal ini telah lebih dahulu berangkat dari pelabuhan Surabaya dengan membawa 152 jamaah haji, 345 jamaah haji dari pelabuhan Semarang, dan 22 jamaah haji dari pelabuhan Tanjung Priok. Sebelum bertolak ke tanah suci, kapal Kota Baru harus berlabuh terlebih dahulu di pelabuhan Belawan untuk mengangkut 356 jamaah haji yang berasal dari Sumatera Timur, Aceh dan Tapanuli.<sup>31</sup>

Sembilan kapal Kongsi Tiga tersebut merupakan kapal pilihan, yang memiliki kondisi cukup baik, dari kapal-kapal Kongsi Tiga lainnya. Hamka yang merupakan ketua rombongan haji dan Asa Bafagih sebagai wartawan harian Merdeka Jakarta yang turut dalam rombongan tersebut menjelaskan bahwa keadaan kapal Kota Baru cukup memuaskan, jamuan makan dan ketersediaan air selama perjalanan sangat baik. Berbeda dengan kapal Kongsi Tiga yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, yang jauh dari kelayakan untuk mengangkut jamaah haji.<sup>32</sup>

Namun demikian, beberapa calon jamaah haji ada yang menghawatirkan buruknya kondisi kapal Kongsi Tiga. Mereka mendengar cerita-cerita atau pengalaman dari jamaah haji tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan kapal-kapal Kongsi Tiga tersebut, dimana kapal-kapal Kongsi Tiga kurang memiliki kelayakan, utamanya pelayanan selama dalam perjalanan yang kurang memuaskan. Oleh karenanya mereka memilih berhaji dengan pesawat terbang. Harian Pedoman memberitakan bahwa jumlah calon jamaah haji yang telah mendaftar untuk berangkat haji dengan pesawat terbang pada tahun itu sebanyak 30 orang.<sup>33</sup> Kementerian Agama dan PPPHI sudah merencanakan untuk menggunakan pesawat K.L.M, yang nantinya mendarat di Iskandariyah, dan kemudian diteruskan ke Jeddah menggunakan pesawat Saudi Arabian Airways.<sup>34</sup> Tetapi sangat disayangkan rencana tersebut batal terlaksana karena adanya pandemi penyakit Cholera yang melanda India dan Pakistan. Karena pesawat asal Indonesia melewati daerah-daerah pandemi tersebut, maka pemerintah Saudi Arabia menolak kedatangan pesawat terbang dari Indonesia.<sup>35</sup> Berbagai usaha dilakukan agar calon jamaah haji dapat berangkat ke

---

<sup>29</sup> Pedoman, 7 Juli 1950.

<sup>30</sup> Pedoman, 23 Juli 1950.

<sup>31</sup> Pedoman, 23 Agustus 1950.

<sup>32</sup> Pedoman, 23 Agustus 1950.

<sup>33</sup> Pedoman, 31 Agustus 1950.

<sup>34</sup> Pedoman, 11 September 1950.

<sup>35</sup> Pedoman, 9 September 1950.

tanah suci dengan pesawat terbang, tetapi tidak kunjung membuahkan hasil, sehingga pemberangkatan calon jamaah haji dengan pesawat terbang gagal dilaksanakan.

#### D. Jamaah Haji Batal Berangkat

Sekalipun penyelenggaraan haji telah sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan bekerjasama dengan PPPHI. Nyatanya, masih banyak calon jamaah haji yang batal berangkat ke tanah suci, karena masih mengikuti lembaga lain selain PPPHI. Harian Pedoman memberitakan bahwa ada 1.500 calon jamaah haji yang mempercayakan pemberangkatan hajinya kepada seorang syekh bernama H.M. Djatinegara, harus terkatung-katung di Jakarta menunggu kapal yang akan memberangkatkan mereka sesuai janji syekh tersebut, tetapi kapal yang ditunggu tidak kunjung datang, sehingga mereka tidak dapat berangkat haji.<sup>36</sup>

Perilaku Syekh-syekh haji memang cukup meresahkan, disamping tidak dapat memberangkatkan jamaah haji, syekh juga sering melakukan penipuan terhadap calon jamaah haji. Menurut pemberitaan harian Pedoman, bahwa ada 34 jamaah haji yang berangkat dari pelabuhan Semarang telah tertipu hingga f. 115.600. Mereka awalnya didatangi oleh 3 orang syekh yang mengaku pesuruh dari Jawatan Agama setempat untuk menarik biaya tiket kapal masing-masing calon jamaah haji sebesar f.3.400. Tanpa curiga apapun mereka kemudian membayar biaya tiket tersebut, dan mendapatkan kwitansi untuk ditukarkan tiket kapal. Namun, ketika mereka menukarkan kwitansi tersebut, barulah menyadari bahwa kwitansi tersebut palsu.<sup>37</sup>

#### E. Kedatangan Jamaah Haji dari Mekah

Pemberitaan tentang kedatangan jamaah haji dari Mekah tahun 1950 merupakan suatu hal yang penting. Tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada seluruh umat Islam di Indonesia, khususnya para saudara di kampung halaman yang telah bersiap melakukan acara penyambutan kedatangan mereka, tetapi juga menjadi bukti sekaligus indikator keberhasilan pemerintah atau Kementerian Agama dalam menyelenggarakan haji untuk pertama kalinya setelah kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya berbagai media massa, termasuk harian Pedoman gencar melakukan pemberitaan terkait itu.

Dalam pemberitaannya, harian Pedoman menjelaskan bahwa kapal-kapal pengangkut jamaah haji pada tahun 1950 tiba di tanah suci pada bulan Oktober hingga November. Salah satu kapal tersebut, Laertes, yang dijawalkan oleh Kongsi Tiga tiba di Tanjung Priok tanggal 30 Oktober 1950 dengan menurunkan jamaah haji asal Jakarta sebanyak 160 orang, Padang 53 orang, Palembang 218 orang, Cirebon 2 orang, dan Makasar 2 orang. Kapal tersebut juga tiba di Semarang pada tanggal 1 Oktober 1950 dengan menurunkan 149 orang, dan Surabaya pada tanggal 2 Oktober 1950 dengan 429 orang.<sup>38</sup> Kapal lainnya seperti, Tawali dan Kota Baru dijadwalkan tiba di tanah air pada 10 November dan 14 November 1950.

Beberapa kapal haji hanya dapat berlabuh dan menurunkan jamaah haji di tiga pelabuhan besar di Jawa, Tanjung Priok, Semarang, dan Surabaya. Beberapa kapal

---

<sup>36</sup> Pedoman, 8 Agustus 1950.

<sup>37</sup> Pedoman, 24 Juli 1950.

<sup>38</sup> Pedoman, 30 Oktober 1950.

haji lain dapat berlabuh dan menurunkan jamaah di Pelabuhan kecil, selain tiga pelabuhan tersebut. Hal ini tergantung kebijakan dari maskapai kapal Kongsi Tiga dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah jamaah haji yang menginginkan turun di pelabuhan kecil.

Adapun jamaah haji yang berasal dari luar Jawa, mereka harus melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan terdekat dari tempat asalnya dengan menggunakan kapal KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*), kapal tersebut merupakan kapal yang mengangkut penumpang antar pulau di Indonesia. Sebagaimana diberitakan oleh harian Pedoman, bahwa terdapat 53 jamaah haji asal Padang yang menumpang kapal Laertes harus turun di Tanjung Priok, beberapa hari berikutnya mereka menumpang kapal Kaloekoe milik maskapai KPM menuju Padang.

## SIMPULAN

Pemberitaan haji tahun 1950 dalam surat kabar harian Pedoman diberitakan selama hampir setahun penuh, dengan tujuan agar umat Islam di Indonesia mengetahui berita, dan khususnya informasi penting seputar ibadah haji dari pemerintah yang pada tahun itu untuk pertama kalinya menjalankan tugas sebagai penyelenggara haji. Berita haji yang dimuat dalam harian Pedoman tersebut berisi tentang adanya beberapa lembaga haji non-pemerintah, yang membuat pemerintah mengeluarkan ketetapan untuk menunjuk dan bekerjasama dengan lembaga haji non-pemerintah ada telah ada, PPPHI. Berita lainnya berisi tentang persiapan-persiapan haji, pemberangkatan haji, beberapa kasus jamaah haji batak berangkat, dan kedatangan jamaah haji dari Mekah. Implikasi dari pemberitaan itu ialah masyarakat Islam di Indonesia semakin tahu dan sadar bahwa penyelenggaraan haji merupakan masalah yang kompleks, dan membutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah (Kementerian Agama), lembaga haji (PPPHI), dan lembaga pers (Pedoman). Mulai persiapan, pemberangkatan, hingga kedatangan jamaah haji dari Mekah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dhiana Putri Larasaty & Afiliasi Illafi. Berita Koran Belanda Pada Masa Kolonial Tentang Desa Widuri Di Kabupaten Pematang, *Siginjai: Journal of History Studies*, Vol. 3 (2), 2023.
- Farida, Anik., dkk. *Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2020).
- Fasih, Ulum. *Mencari Berkah Tanah Suci: Pengelolaan Haji Oleh Menerintah dan Lembaga Swasta di Indonesia 1949-1959* (Yogyakarta: Integritas Media, 2022).
- <https://historia.id/kultur/articles/rosihan-anwar-jatuh-bangun-koran-kiblik-vX4dv/page/4> diakses tanggal 11 Juli 2024.
- Ibnu Aghniya & Dewi Yuliaty. Harian Pedoman: Media Ekspresi Ideologis Partai Sosialis Indonesia Menjelang Pemilu 1995, *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021.

Ida Nuraini & Narayana Mahendra. Kebijakan Redaksi Media di Indonesia dalam Pemberitaan Haji Tahun 2020, *Islamic Communication Journal*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Isabella & Firdaus Komar. Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 2005).

Martin Van Bruinessen. Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji, *Indonesia dan Haji*, ed. Dick Douwes & Nico Kaptein, terj. Soedarso Soekarno (Jakarta: INIS, 1997).

Pedoman, 20 Januari 1950.

Pedoman, 21 Januari 1950.

Pedoman, 26 Januari 1950.

Pedoman, 23 Februari 1950.

Pedoman, 4 Maret 1950.

Pedoman, 31 Maret 1950.

Pedoman, 3 April 1950.

Pedoman, 29 Agustus 1950.

Pedoman, 22 Mei 1950.

Pedoman, 23 Mei 1950.

Pedoman, 7 Juli 1950.

Pedoman, 23 Juli 1950.

Pedoman, 24 Juli 1950.

Pedoman, 3 Agustus 1950.

Pedoman, 8 Agustus 1950.

Pedoman, 23 Agustus 1950.

Pedoman, 29 Agustus 1950.

Pedoman, 31 Agustus 1950.

Pedoman, 9 September 1950.

Pedoman, 11 September 1950.

Pedoman, 30 Oktober 1950.